

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 20 P/HUM/2017
TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1 TAHUN 2017 TENTANG
TATA TERTIB

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ZAKIYAH NUR ZUROIDAH
NIM: 201310110311423

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2018

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 20 P/HUM/2017
TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1 TAHUN
2017 TENTANG TATA TERTIB**

Diajukan Oleh:

ZAKIYAH NUR ZUROIDAH

201310110311423

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 26 Januari 2018

Pembimbing Utama,



Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Pembimbing Pendamping,



Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Dekan,



Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

SKRIPSI

Disusun oleh:

ZAKIYAH NUR ZUROIDAH

201310110311423

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 26 Januari 2018

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

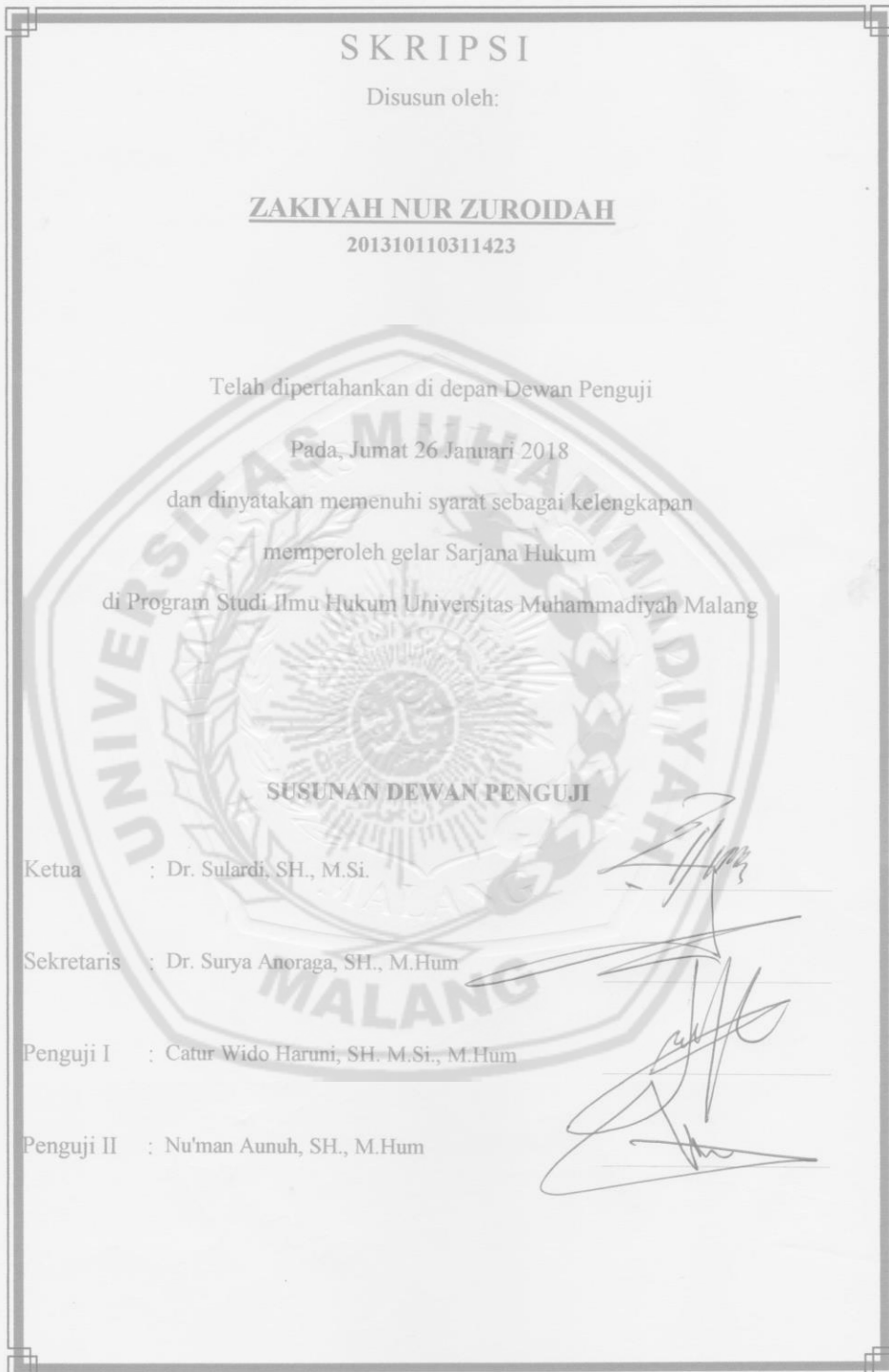
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Sekretaris : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum

Penguji I : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Kepada Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: Analisis Putusan Mahkamah Agung No 20 P / HUM / 2017 Tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa kendala dalam pengerjaannya, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak yang mendukung penulis, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis serta saudara yang selalu memberikan dorongan dan do'a restu dalam penulisan tugas akhir hukum.
2. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan selaku Dosen Wali yang telah membantu, membimbing, serta memberi dukungan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak Dr. Sulardi, S.H., M.Si selaku pembimbing I dan sebagai dosen pengarah yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir juga menyetujui dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis juga menyetujui dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, Tata Usaha dan keluarga besar Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang selalu mendorong dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-kawan kelas G angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
9. Kawan-kawan dari Twinning Civic Hukum Angkatan 2013 dan konsentrasi Hukum Tata Negara, penulis bangga pernah belajar dan berjuang bersama kalian.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 18 Januari 2018

Penulis

Zakiyah Nur Zuroidah

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Penulisan Hukum bukan Plagiasai.....	iii
Ungkapan Pribadi atau Motto.....	iv
Abstraksi.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Jenis Bahan Hukum	12
3. Teknik dan Bahan Hukum.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Trias Politica.....	17
B. Teori Perundang-Undangan.....	20
1. Teori Hierarki.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Dewan Perwakilan Daerah.....	23
1. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah.....	24
2. Struktur Dewan Perwakilan Daerah.....	25
3. Tugas dan Wewenang DPD	26
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Tata Tertib.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Judicial Review.....	31

1. Mahkamah Konstitusi.....	31
2. Mahkamah Agung	33
BAB III PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan MA No 20P/HUM/2017 tentang Uji Materiil Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib.....	37
1. Pihak Pemohon Uji Materiil	37
2. Pihak Termohon Uji Materiil.....	38
3. Diskripsi Kasus.....	38
4. Kedudukan Hukum Uji Materiil Pemohon (legal Standing).....	41
5. Pertimbangan Hukum.....	42
6. Amar Putusan	48
B. Implikasi Hukum Putusan MA No 20P/HUM/2017 terhadap legalitas Pimpinan DPD RI masa Jabatan 2017-2019.....	49
1. Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah oleh Wakil Mahkamah Agung.....	50
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Putusan Mahkamah Agung No 20 P / Hum / 2017 Tentang Uji Materiil Terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib |
| Lampiran 2 | Surat Tugas Pembimbing |
| Lampiran 3 | Berita Acara Seminar |
| Lampiran 4 | Kartu Kendali Bimbingan |



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, Lembaga Penelitian universitas Lampung, Lampung, 2008

Ady, Kusnadi dkk. 2009. *Penelitian Hukum Tentang Potensi Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD*. Jakarta : Departemen Hukum dan HAM RI

Asshidqie, Jimly. 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta. UII Press

Asshidqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta

Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang

Manan, Bagir. 2005. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. FH-UII Press. Cetakan III. Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.

Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1986

Sidharta, B. Arief. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Sri Soemantri M. 1982. *Hak Menguji Materiil di Indonesia*. Alumni. Bandung.

Wiranata, I Gede A.B., 2005. *Dasar-Dasar Etikadan Moralitas*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Undang- Undang

Undang- Undang Dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah di Amandemen berikut naskah komprehensif perubahan Undang- Undang Dasar tahun 1945.

Undang Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang Undang No 42 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan DPD RI No 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Putusan MA No 20 P / HUM / 2017 Tentang permohonan keberatan hak Uji Materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib

Undang- Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

Efendi Erdianto. 2013. *Model Demokrasi Langsung Versus Demokrasi Perwakilan Dan Ancaman Politik Uang Dalam Kaitan Dengan Cita Hukum Bangsa Indonesia*. Disampaikan dalam Acara Seminar dan Diskusi tentang Pemilihan Umum dalam rangka Pertemuan BKS PTN Wilayah Barat yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau, di Batam tanggal 3-4 Mei 2013

Firmansyah, Miki. 2014. *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Bikameral di Indonesia*. Vol 1 No 1. Jurnal cita Hukum. Jakarta. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN .

Martosoewignjo, Sri Soemantri. *Makalah Focus Group Discussion “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”*, Jakarta, 28 Januari 2003, Yogyakarta, 24 Maret 2003, dan Semarang.

Moh. Mahfud MD. 2009. *“Konstitusi Negara”*. Makalah disampaikan dalam Acara Orientasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan 2009-2014 pada Selasa, 8 September 2009 di Ball Room Hotel Harris Tebet. Jakarta

Moh Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Disampaikan pada temu wicara ketua mahkamah konstitusi dengan civitas akademika IAIN Ar-Riniry. Banda Aceh 29 Oktober 2009

- Mulyanto Achmad. 2013. *Problematisa pengujian Peraturan Perundang- Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Vol 2 No 1. Universitas Sebelas Maret.
- Muchammad Ali Safa'at, *Parlemen Bikameral*, Universitas Brawijaya Press (Malang: UB Press, 2010)
- Ni'matul Huda. 2008. "Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia". Jurnal Hukum No. 1 Vol.15 Januari 2008. Hal 104
- Nusantara, Abd Hakim G. "Mahkamah Konstitusi: Perspektif Politik dan Hukum", Kompas 24 September 2002
- Palguna, I Dewa Gede, *Makalah Focus Group Discussion "Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia"*, Semarang.
- Patta, Abd kadir. 2009. *Masalah dan Prospek Demokrasi* . Jurnal Academica. FISIP untad. Vol 1. ISSN 1411-3341
- Prasisko, Yongky Gigih. 2016. *Gerakan sosial baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 03. No 02
- Salmon,E.M.N. 2011.*Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal hukum. Vol 18 no 4.
- Tim penyusun cetak biru Mahkamah Konstitusi. 2004. *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institut Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Wirdan Muhammad, 2016. *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang

Internet

- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2017. *Putusan MA Akhirnya Menghentikan Rencana*. <http://www.dpd.go.id>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2017 Pukul 16.00 WIB
- Setyaningsih Yuniati. *Analisis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. www.fisip.undip.ac.id. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

Pasaribu Reni Rawasita. 2005. *Amanat Undang- Undang dan Tata Tertib*.
www.parlemen.net. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

